

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia telah memasuki era baru dalam keterbukaan informasi, hal ini sejalan dengan disahkannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 yang berisi tentang kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk transparansi informasi dan pemenuhan dari hak asasi manusia (HAM), di mana hak masyarakat terkait informasi mendapatkan jaminan, sehingga masyarakat juga dapat turut serta memantau jalannya kinerja pemerintah ataupun badan publik untuk mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang KIP adalah karena adanya permasalahan keterbatasan informasi publik pada era orde baru, saat itu masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi tentang pemerintahan sehingga dengan lahirnya Undang-Undang tersebut membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pemerintahan. Transparansi informasi publik memberikan dampak positif baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah penerapan transparansi informasi ini dapat mendorong peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan dan juga pertanggungjawaban program-program kerja yang dilaksanakan pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat, selain untuk turut mengontrol setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah juga hak hak masyarakat mengenai informasi publik terpenuhi sehingga dapat turut mewujudkan salah satu ciri negara demokratis yaitu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Menyediakan pelayanan informasi publik merupakan kewajiban badan publik seperti yang dimuat dalam Undang-Undang KIP. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (UU

KIP Pasal 7 ayat 2). Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara atau penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, badan publik sebagai pelaksana kebijakan tersebut wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan ( Pasal 7 ayat 1 UU KIP) . Dalam Undang-Undang, lingkup badan publik meliputi lembaga-lembaga dan penyelenggara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik harus dilakukan secara konsisten dan disiplin sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, namun juga harus adanya kesetaraan baik pemerintah atau badan publik dan masyarakat atau pengakses informasi. Selain hak-hak yang harus diterima, masyarakat dan badan publik juga harus menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik seperti yang dimuat dalam Undang-Undang KIP, Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi yang dapat di akses oleh publik dengan mudah dan efisien. Salah satu contohnya adalah penggunaan *website* sebagai media pelayanan informasi publik. Tersedianya media informasi yang baik merupakan perwujudan keberhasilan badan publik dalam melaksanakan kebijakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

*Website* adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file file nya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan *homepage*. *Homepage* berada pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah *homepage* disebut *child page*, yang berisi *hyperlink* ke halaman lain dalam web. (Gregorius, 2000:30). Di era kemajuan teknologi seperti sekarang, *website* merupakan media paling

potensial dalam menyampaikan informasi ke khalayak luas. Salah satu keunggulan *website* adalah pembiayaan pembuatan *website* jauh lebih murah dan terbatas oleh jarak dan waktu.

Saat ini sudah banyak badan publik yang mendayagunakan *website* sebagai media informasi dan berguna sebagai penyambung antara badan publik dengan masyarakat. Sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat, tepat, dan efisien. Salah satu badan publik yang memanfaatkan *website* sebagai media informasi publik adalah Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta adalah badan publik yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pariwisata . Salah satu bentuk pelayanan informasi publik yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melalui *website* [www.visitingjogja.com](http://www.visitingjogja.com) yang didalamnya memuat informasi informasi seperti informasi yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan kinerja Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga informasi seputar kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya informasi yang termuat dalam *website* [www.visitingjogja.com](http://www.visitingjogja.com) tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat luas untuk mengetahui seputar Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus informasi mengenai pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta secara mudah, bahkan bagi masyarakat dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan membahas tentang pengelolaan *website* [www.visitingjogja.com](http://www.visitingjogja.com) sebagai pelayanan informasi publik oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik pokok masalah yang diangkat untuk merumuskan masalah tentang “ Bagaimana pengelolaan *website* [www.visitingjogja.com](http://www.visitingjogja.com) sebagai

pelayanan informasi publik oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta?”

### **C. Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Adapun maksud dan tujuan dan keinginan penulis untuk mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah :

- a. Untuk menambah pengalaman praktik di bidang humas, terutama humas *cyber*. Sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja. Selain itu mempelajari bagaimana badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- b. Mengetahui praktik langsung di lapangan sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja.
- c. Mengetahui bagaimana pengelolaan *website* dalam hal pelayanan informasi oleh lembaga pemerintah.

### **D. Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

#### 1. Manfaat bagi penulis

Manfaat akademis yang diperoleh penulis, diharapkan dapat turut serta dalam mendukung pengembangan ilmu *Public Relations* dalam berbagai aspek. Penulis mendapat ilmu dari praktik langsung sebagaimana yang telah diajarkan di masa perkuliahan. Selain itu menjalin hubungan baik dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 2. Manfaat bagi perusahaan

Perusahaan mendapatkan bantuan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus dapat membagi ilmu dengan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL). Selain itu perusahaan dapat menerima saran dan masukan terkait *website* dari mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL).

### **E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

#### a. Tempat

Perusahaan: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat: Jalan Janti No.4, Wonocatur, Banguntapan, Kecamatan  
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55198

Telepon: (0274) 587486

Email: [dispar@visitingjogja.com](mailto:dispar@visitingjogja.com)

Website: [www.visitingjogja.com](http://www.visitingjogja.com)

Jam kerja: Senin - : 07.30 - 16.00

Jumat: 07.30 - 15.00

b. Waktu

Tanggal: 3 Februari – 1 April 2020

Bagian: Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Program

Waktu: Senin - jumat (5 hari kerja)

Pukul: Senin - kamis : 07.30 – 16.00

Jumat : 07.30 – 15.00

## F. Metode Pengumpulan Data

Data - data yang mendukung dalam penulisan laporan kegiatan ini. Penulis memperolehnya dengan metode sebagai berikut :

a. Data Primer

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam (*intensive/ depth interview*) adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang – ulang) secara intensif. Biasanya wawancara mendalam menjadi alat utama pada penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Kriyantono dalam Ardianto, 2010: 178 – 179). Dalam laporan ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara. Adapun narasumber wawancara, sebagai berikut :

- Bapak Adi (Staff bagian program khusus *website*)
- Ibu Ayu (staff bagian program khusus *website*)

## 2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut (Rachmat Krisyantono,2006:110).

Penulis melakukan observasi langsung di Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurang lebih 2 bulan , selanjutnya melakukan pengamatan terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan akhirnya fokus pada Sub Bagian Program (pengelolaan *website* [www.visitingjogja.com](http://www.visitingjogja.com)) yang dilaksanakan selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL)

## 3. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif merupakan kegiatan berkontribusi langsung terhadap objek sehingga dapat memahami dan merasakan secara aktif. Dalam hal ini, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melaksanakan kegiatan penggunaan *website* [www.visitingjogja.com](http://www.visitingjogja.com) sebagai media pelayanan informasi publik yaitu dengan turut menulis dan mengunggah berita seputar event kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta di *website* [www.visitingjogja.com](http://www.visitingjogja.com). Beberapa contohnya, seperti :

1. Sleman Temple Run (2 Maret 2020)
2. Jogjajanan 2020 (5 Maret 2020)
3. Workshop Seni Lukis Talenan (6 Maret 2020)
4. Pawai Budaya Ogoh Ogoh (11 Maret 2020)
5. Musik Malam TBY Gliyak-Gliyak (12 Maret)

## b. Data Sekunder

### 1. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai

masalah yang akan diteliti (Sarwono:2006). Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data melalui buku buku yang didapatkan dari perpustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian dan juga penelitian sebelumnya yang didapatkan melalui internet.